

Sunda Empire dalam Era *Post-Truth*: Misinformasi, Psikologi Kepercayaan Publik, dan Implikasinya terhadap Demokrasi Indonesia

Widhya Facitha Rezaliany^{1*}, Tiara Tahta Anindhita², Ali Ridho³, Saffiya Hisaan Irahma⁴, Arofah Minasari⁵

¹⁻⁵Hubungan Internasional, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

E-mail: wfr5308@student.uns.ac.id¹, tahta.anindhita@student.uns.ac.id², ridhonahdi@student.uns.ac.id³, saffiyahisaan@student.uns.ac.id⁴, arofah.minasari@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: wfr5308@student.uns.ac.id

Abstract. This study examines the phenomenon of the Sunda Empire as a socio-political phenomenon in the post-truth era, highlighting how public trust can be formed in pseudo-historical claims and its impact on the quality of democracy in Indonesia. This study uses a qualitative approach through a literature review modified from a systematic literature review framework to thematic analysis and discourse analysis, with sources consisting of scientific journals, reports, public documents, credible news, and relevant social media content. The synthesis results show that the Sunda Empire builds pseudo-legitimacy through narrative repetition, the use of symbols of authority, a formal communication style, and the exploitation of the social media ecosystem that accelerates virality. The findings also show that public acceptance is influenced by psychological mechanisms such as the illusion of truth effect, the need for identity, and the tendency to trust familiar and emotional information. The implication is that the vulnerability of information and political literacy can weaken public deliberation, increase the space for misinformation, and erode trust in democratic institutions. This study emphasizes strengthening information literacy, media literacy, and political literacy through formal education, community programs, and collaboration with digital platforms as a strategy for democratic resilience in the post-truth era.

Keywords: Indonesian Democracy; Misinformation; Post-Truth; Public Trust; Sunda Empire.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena Sunda Empire sebagai gejala sosial-politik di era *post-truth*, dengan menyoroti bagaimana kepercayaan publik dapat terbentuk terhadap klaim pseudo-sejarah serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka yang dimodifikasi dari kerangka *systematic literature review* menjadi analisis tematik dan analisis wacana, dengan sumber berupa jurnal ilmiah, laporan, dokumen publik, pemberitaan kredibel, dan konten media sosial yang relevan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa Sunda Empire membangun legitimasi semu melalui pengulangan narasi, penggunaan simbol otoritas, gaya komunikasi formal, dan eksploitasi ekosistem media sosial yang mempercepat viralitas. Temuan juga memperlihatkan bahwa penerimaan publik dipengaruhi mekanisme psikologis seperti *illusory truth effect*, kebutuhan identitas, dan kecenderungan mempercayai informasi yang familier serta emosional. Implikasinya, kerentanan literasi informasi dan politik dapat melemahkan deliberasi publik, memperbesar ruang misinformation, dan mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Penelitian ini menekankan penguatan literasi informasi, literasi media, dan literasi politik melalui pendidikan formal, program komunitas, serta kolaborasi dengan platform digital sebagai strategi ketahanan demokrasi di era *post-truth*.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia; Kepercayaan Publik; Misinformasi; *Post-Truth*; Sunda Empire.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sempat digemparkan oleh kemunculan sejumlah kelompok yang mengklaim diri sebagai kerajaan atau kekaisaran dengan legitimasi historis, meskipun klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara memadai. Dua contoh paling menonjol yang memicu pro dan kontra ialah Keraton Agung Sejagat (KAS) yang muncul di Purworejo pada Januari 2020 (Bramasta & Hardiyanto, 2020) dan Sunda Empire yang mulai mendapat perhatian publik pada akhir 2019 di Bandung (Kompas.tv, 2020). Kedua kelompok ini memanfaatkan simbol-simbol kerajaan, struktur organisasi pseudo-militer, serta narasi sejarah alternatif untuk menarik perhatian dan membangun kesan otoritas. Fenomena tersebut kemudian populer disebut sebagai “keraton

palsu”, yakni kelompok yang membangun otoritas simbolik tanpa landasan historis yang jelas maupun legitimasi legal (Saputra, 2020).

Menariknya, meskipun klaim-klaim yang mereka sampaikan tidak disertai bukti faktual yang kuat, sebagian orang tetap menunjukkan kepercayaan dan dukungan. Dukungan ini kerap muncul tanpa proses verifikasi kritis yang memadai, seolah logika dan data bisa “dinegosiasikan” oleh narasi yang terdengar meyakinkan (Kinnear et al., 2024). Di tengah banyaknya penelitian mengenai hoaks dan misinformasi di Indonesia, kajian yang secara spesifik menghubungkan fenomena keraton palsu dengan psikologi kepercayaan publik serta risikonya terhadap demokrasi masih relatif terbatas. Celah ini penting karena fenomena tersebut bukan sekadar isu budaya atau sosial, melainkan juga berkaitan dengan cara masyarakat membentuk keyakinan politik dan mempercayai otoritas.

Kemunculan keraton palsu tidak dapat dilepaskan dari peran media sosial yang mempercepat penyebaran informasi sekaligus menarik perhatian publik. Dalam konteks politik Indonesia di era digital, media sosial menjadi ruang yang memungkinkan narasi sensasional menyebar luas tanpa proses verifikasi memadai. Paparan berulang terhadap informasi palsu dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mempercayainya meskipun awalnya skeptis (Pillai & Fazio, 2021). Artinya, kekuatan narasi dan frekuensi kemunculan pesan berpotensi menggeser penilaian publik: sesuatu yang semula terdengar ganjil bisa terasa “masuk akal” hanya karena terus beredar dan dibicarakan.

Pada saat yang sama, masyarakat dihadapkan pada krisis literasi politik dan sejarah. Sebagian individu tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai struktur negara modern, alur sejarah nasional, maupun mekanisme kekuasaan yang sah. Akibatnya, klaim fantastis seperti kekaisaran dunia, hak atas pemerintahan global, atau warisan kerajaan Nusantara dapat diterima oleh sebagian orang tanpa verifikasi kritis (Redaksi, 2025). Kondisi ini diperkuat oleh situasi post-truth, yakni melemahnya pengaruh fakta objektif dalam membentuk opini publik ketika emosi, opini personal, dan kepercayaan subjektif lebih dominan dibanding bukti empiris (Lewandowsky et al., 2017). Dalam iklim seperti ini, narasi dramatis dan sensasional cenderung lebih mudah dipercaya daripada penjelasan yang berbasis data.

Perkembangan teknologi komunikasi juga mendorong penyebaran misinformasi dan disinformasi dalam berbagai bentuk, seperti video propaganda, dokumen palsu, atau simbol-simbol yang tampak resmi. Konten-konten tersebut dapat beredar luas tanpa penyaringan, sementara pola konsumsi informasi yang cepat dan dangkal membuat publik semakin rentan terhadap manipulasi simbolik dan retorika pseudo-historis. Dalam situasi demikian, pendiri keraton palsu memanfaatkan celah literasi dan dinamika media digital untuk membangun

legitimasi semu, merekrut pengikut, bahkan memengaruhi persepsi publik tentang otoritas politik.

Fenomena keraton palsu menjadi sangat relevan untuk dikaji karena menguat pada periode 2019–2020, beriringan dengan meningkatnya polarisasi politik, maraknya hoaks, serta menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi demokrasi, sebuah kecenderungan yang dalam beberapa bentuk masih terasa hingga kini. Oleh karena itu, kemunculan keraton palsu tidak semata peristiwa unik, melainkan gejala yang mencerminkan kerentanan demokrasi Indonesia terhadap manipulasi informasi dan eksploitasi simbol kekuasaan.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini berfokus pada fenomena Sunda Empire dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana kelompok tersebut membangun kepercayaan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong sebagian masyarakat mempercayai eksistensinya beserta narasi konspiratif yang menyertainya, serta menilai implikasinya terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Dengan menghubungkan fenomena keraton palsu dengan aspek psikologi kepercayaan publik, dinamika post-truth, dan ekosistem misinformasi digital, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pola bagaimana narasi fiktif dapat memperoleh dukungan di ruang publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memetakan berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia dalam menjaga ketahanan informasi serta mempertahankan rasionalitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. KAJIAN TEORITIS

Era *post-truth* adalah situasi ketika batas antara kebohongan dan fakta menjadi kabur, bukan karena kebenaran hilang, tetapi karena kebenaran kalah ramai. Dalam kondisi seperti ini, informasi palsu lebih mudah mencuri perhatian dan, pada titik tertentu, memperoleh kepercayaan publik. Di tengah banjir informasi era digital, banyak orang tidak lagi menempatkan akurasi sebagai prioritas utama. Mereka cenderung menerima informasi yang terasa selaras dengan keyakinan pribadi, pengalaman emosional, atau identitas sosial yang mereka pegang. Akibatnya, klaim yang lemah secara data tetap bisa mendapat penerimaan, karena *nyangkut* secara perasaan. Dalam dunia post-truth, ketika emosi dan keyakinan personal lebih kuat membentuk opini publik daripada fakta objektif. Dengan kata lain, *post-truth* dapat dipahami sebagai keadaan ketika kebenaran tidak lagi menjadi landasan utama debat publik, digantikan oleh opini emosional dan kepercayaan subjektif (Lewandowsky et al., 2017).

Dalam konteks ini, kebohongan dapat *diadopsi* masyarakat melalui proses yang terlihat sederhana: sebuah informasi disusun seolah-olah faktual, dibungkus dengan narasi yang meyakinkan, lalu disebarluaskan dengan cara yang menarik dan mudah diingat. Kajian psikologi juga membantu menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Brashier dan Marsh dalam artikel *Judging Truth* menekankan bahwa manusia menilai kebenaran bukan semata lewat norma moral atau sikap politik, melainkan melalui mekanisme kognitif-psikologis (Brashier & Marsh, 2020). Penilaian itu dipengaruhi oleh setidaknya tiga hal: kecenderungan dasar menerima informasi, perasaan “lancar” atau mudah dicerna (*fluency*) yang membuat narasi tampak masuk akal, serta pengetahuan dan sumber informasi yang dimiliki sebelumnya yang membentuk cara seseorang menimbang klaim baru. Singkatnya, sebuah informasi bisa tampak “benar” bukan karena bukti kuat, tetapi karena terasa rapi, familier, dan cocok dengan kerangka pikir seseorang.

Secara alami manusia juga memiliki bias untuk menerima informasi baru sebagai “benar” karena dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar informasi yang kita terima memang benar. Masalahnya, bias ini menjadi celah ketika informasi yang salah diproduksi secara strategis. Manusia cenderung mempercayai informasi yang terdengar atau terlihat familier. Ketika sebuah pesan diulang dan muncul dalam berbagai bentuk yang saling menguatkan, ia membentuk pola yang terasa konsisten, lalu perlahan dianggap sebagai kebenaran. Kerangka ini relevan untuk membaca bagaimana Sunda Empire dapat menyusun narasi pseudo-sejarah dan mendapatkan perhatian publik. Di sisi lain, individu lebih mudah menerima narasi konspiratif ketika ada kebutuhan psikologis tertentu, misalnya kebutuhan akan identitas kelompok, rasa aman, atau dorongan untuk merasa “lebih tahu” dibanding orang lain (Palecek & Hampel, 2024). Kepercayaan publik juga dapat dipengaruhi oleh otoritas simbolik yang ditampilkan, seperti seragam, gelar aristokratis, atribut kenegaraan, serta nostalgia terhadap masa lalu yang dibayangkan lebih stabil atau lebih mulia.

Sunda Empire memadukan narasi konspirasi dan simbol-simbol kerajaan sebagai strategi manipulasi. Secara umum, teori konspirasi dipahami sebagai keyakinan bahwa peristiwa besar terjadi karena rencana tersembunyi pihak tertentu, bukan karena kebetulan, sehingga segala hal tampak “sengaja” dan “terkendali” (Brashier, 2023). Keyakinan semacam ini membuat sebagian orang menilai narasi tersebut bukan sebagai fiksi, melainkan sebagai “kebenaran yang ditutup-tutupi” (O’Mahony et al., 2023). Bersamaan dengan itu, strategi simbolik mereka dapat dibaca melalui gagasan tentang kekuatan simbolik, yakni kemampuan simbol untuk membentuk realitas sosial sehingga terlihat sah (Christensen, 2024). Atribut militer, struktur organisasi hierarkis, serta narasi kekuasaan global bekerja sebagai alat untuk

membuat otoritas tampak wajar dan pantas dipercaya. Praktik ini sejalan dengan politik simbolik yang menekankan bahwa tindakan politik sering kali bekerja lewat produksi makna dan rasa, bukan semata kekuasaan material (Mendelberg, 2022). Dengan demikian, simbol dan representasi berfungsi membuat otoritas terlihat natural, logis, dan “resmi”, meski fondasinya rapuh.

Strategi tersebut semakin kuat ketika narasi diulang secara konsisten. Di sinilah *Illusory Truth Effect* menjadi penting: paparan berulang terhadap sebuah informasi, termasuk informasi yang keliru, dapat membuat orang semakin percaya karena informasi itu terasa makin familier (Udry & Barber, 2024). Valid atau tidaknya isi pesan menjadi kurang menentukan dibanding “kelancaran” narasi dan frekuensi kemunculannya. Mekanismenya cukup manusiawi: otak lebih mudah memproses informasi yang sering diulang, dan kemudahan pemrosesan ini kerap disalahartikan sebagai tanda kebenaran. Akibatnya, sesuatu terasa “benar” karena mudah dipahami dan diingat, bukan karena didukung bukti empiris yang kuat (Brashier & Marsh, 2020). Penelitian lain bahkan menunjukkan efek ini dapat tetap bekerja meskipun orang sudah mengetahui informasi tersebut salah (Vellani et al., 2023). Artinya, pendidikan dan kapasitas rasional tidak selalu menjadi tameng otomatis ketika seseorang terus-menerus terpapar klaim yang sama. Kondisi seperti beban kognitif tinggi, literasi informasi yang rendah, dan lingkungan yang dipenuhi arus data (*infodemic*) makin memperbesar efek ini karena orang cenderung memakai jalan pintas kognitif alih-alih memverifikasi secara mendalam.

Dalam demokrasi modern, media sosial memang memperluas akses informasi dan membuka ruang partisipasi. Namun media sosial tidak selalu memiliki mekanisme penyaringan yang memadai untuk memastikan validitas informasi. Karena itu, kualitas ruang publik akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan melakukan verifikasi. Tanpa kemampuan tersebut, publik rentan terhadap informasi palsu yang bisa menurunkan kualitas demokrasi dan mendorong pengambilan keputusan yang tidak rasional. Kerentanan masyarakat terhadap berita palsu membuat mereka lebih mudah dimanipulasi, sementara ruang demokrasi dapat dikuasai aktor-aktor yang mengeksploitasi misinformasi untuk kepentingan politik. Dampaknya bukan hanya kebingungan informasi, tetapi juga penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kacaunya persepsi masyarakat terhadap sistem politik (Comito et al., 2023).

Berdasarkan rangkaian teori tersebut, fenomena Sunda Empire dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi post-truth, mekanisme psikologis *illusory truth effect*, kerentanan kepercayaan publik terhadap narasi yang memberi rasa kepastian dan identitas, serta strategi manipulasi melalui konspirasi dan simbolik yang diperkuat oleh ekosistem media sosial. Dalam

situasi ini, masyarakat tidak menilai kebenaran hanya dari fakta, tetapi juga dari emosi, keakraban informasi, dan simbol kekuasaan yang ditampilkan. Pada akhirnya, kondisi ini membawa implikasi serius bagi demokrasi: kemampuan publik membedakan fakta dan hoaks melemah, dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi ikut tergerus.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan pustaka (*literature review*) untuk menganalisis fenomena kemunculan Sunda Empire dalam konteks era post-truth, psikologi kepercayaan publik, serta implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan ilmiah, teori, serta diskursus yang relevan secara mendalam dan sistematis (Sauer & Seuring, 2023). Penelitian ini mengacu pada kerangka *systematic literature review*, namun dengan penyesuaian agar lebih kontekstual terhadap kajian sosial-politik dan fenomena kontemporer. Berbeda dari SLR konvensional yang berfokus pada evaluasi kuantitatif atau meta-analisis, penelitian ini menekankan analisis tematik kualitatif dan wacana untuk mengidentifikasi pola argumen, konstruksi narasi, serta relasi antar konsep (Naeem et al., 2023).

Sumber data penelitian mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas post-truth, misinformasi, psikologi kepercayaan publik, demokrasi deliberatif, serta fenomena keraton palsu; laporan penelitian; pemberitaan media massa yang kredibel; dokumen publik terkait Sunda Empire; dan konten media sosial yang relevan dengan isu penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data akademik seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan *DOAJ*, serta arsip media terpercaya. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, rentang publikasi sepuluh tahun terakhir, dan kredibilitas akademik. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, seperti post-truth, *illusory truth effect*, kepercayaan publik, misinformasi politik, demokrasi deliberatif, dan konteks Sunda Empire.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik dan analisis wacana untuk mengungkap pola konseptual, relasi antar teori, serta implikasinya terhadap realitas sosial dan politik. Melalui proses sintesis, penelitian ini menghubungkan temuan teoretis dengan fenomena Sunda Empire secara argumentatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar merangkum literatur, tetapi juga menyusun pemetaan konseptual yang utuh dan kritis dalam kerangka teori post-truth dan disinformasi digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sunda Empire dan Persepsi Publik terhadap Eksistensinya

Sunda Empire mulai dikenal publik sejak sekitar 2017, meskipun namanya baru benar-benar mencuat pada periode 2019–2020 ketika berbagai pernyataan dan videonya viral di media sosial serta diberitakan secara luas oleh media daring. Kelompok ini mengklaim diri sebagai sebuah kekaisaran global dengan otoritas atas diplomasi, militer, dan tata kelola pemerintahan dunia, sebuah klaim yang tidak memiliki dasar historis maupun legitimasi hukum. Untuk memperkuat kesan tersebut, Sunda Empire membangun struktur organisasi semi-militer dengan jabatan seperti *secretary general*, *prime minister*, hingga *commander*. Struktur ini menyerupai birokrasi internasional, tetapi pada dasarnya bersifat simbolik dan fiktif.

Figur yang paling menonjol dalam organisasi ini adalah Rangga Sasana, yang tampil sebagai juru bicara sekaligus narator utama berbagai klaim pseudo-sejarah yang disampaikan kepada publik. Narasi tersebut kemudian diperkuat dengan penyebutan tokoh lain, seperti Nasen Soekanto, yang disebut sebagai pendiri dan pemimpin pusat organisasi. Di luar lingkaran inti ini, terdapat sejumlah pengikut dan simpatisan yang menerima narasi Sunda Empire sebagai kebenaran, bahkan terlibat dalam aktivitas simbolik yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok.

Kehadiran Sunda Empire di ruang publik dapat dilacak melalui beberapa momentum penting. Pada akhir 2019, pernyataan dan video mereka mulai menyebar luas di media sosial dan memicu rasa penasaran sekaligus kontroversi. Pada Januari 2020, aparat kepolisian memanggil tokoh-tokoh utama untuk klarifikasi, yang justru semakin meningkatkan sorotan publik. Periode setelahnya diwarnai oleh diskusi luas mengenai hoaks, fenomena pseudo-politik, dan peran media dalam membentuk serta memperbesar narasi alternatif.

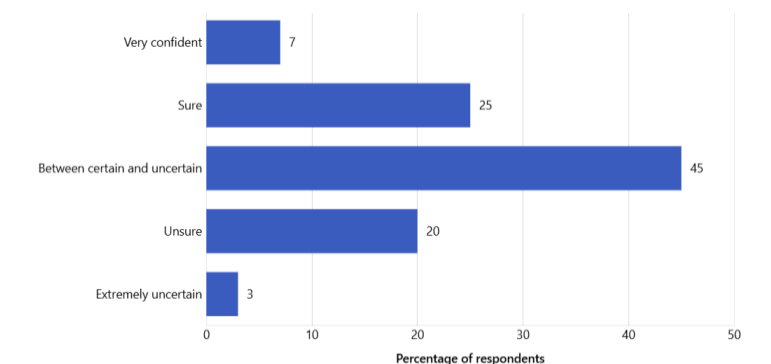
Fenomena Sunda Empire tidak hanya menunjukkan keberadaan kelompok pseudo-politik, tetapi juga menyingkap persoalan yang lebih dalam, yakni rendahnya literasi politik dan sejarah di sebagian lapisan masyarakat. Keterbatasan kemampuan untuk memverifikasi informasi, ditambah pemahaman yang minim mengenai struktur negara modern dan sejarah politik, menciptakan ruang di mana klaim pseudo-historis dapat diterima tanpa proses validasi kritis. Dalam situasi ini, fakta sering kali bukan lagi rujukan utama, terutama ketika narasi yang ditawarkan terasa lebih meyakinkan secara emosional. Manipulasi informasi dilakukan melalui penyusunan pseudo-history, yakni kisah sejarah yang direkayasa namun dikemas secara meyakinkan. Istilah-istilah seperti “dokumen rahasia”, “perjanjian internasional”, atau “data intelijen” digunakan untuk membangun kesan otoritas. Cara penyampaian yang formal, tegas,

dan penuh keyakinan semakin memperkuat kredibilitas semu di mata audiens, meskipun isinya tidak dapat diverifikasi.

Dari sisi psikologis, daya tarik Sunda Empire juga berkaitan dengan kebutuhan manusia akan identitas dan rasa memiliki. Di tengah ketidakpastian sosial, narasi konspiratif menawarkan penjelasan yang tampak utuh dan menenangkan secara emosional, sebuah mekanisme yang oleh Douglas dan rekan-rekannya (2019) disebut sebagai *cognitive stabilizer* (Kılınçoğlu, 2024). Simbol-simbol feodal dan kisah kejayaan masa lalu turut memberi daya tarik nostalgia yang memperkuat legitimasi narasi kelompok. Peran media sosial menjadi sangat krusial dalam memperbesar pengaruh Sunda Empire. Algoritma platform digital cenderung mengedepankan konten yang sensasional dan kontroversial, sehingga narasi kelompok ini menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi berbasis fakta. Akibatnya, terbentuk ruang gema (*echo chamber*) yang menguatkan keyakinan pengikut, bahkan ketika klaim-klaim tersebut telah dibantah secara resmi.

Data terkait tingkat kepercayaan diri masyarakat terhadap berita hoaks

Grafik “Tingkat Kepercayaan Diri Masyarakat Indonesia dalam Mengidentifikasi Berita Hoaks (2022)” memberikan gambaran awal tentang bagaimana masyarakat menilai kemampuan dirinya sendiri dalam membedakan informasi benar dan palsu. Data ini bersumber dari Kominfo bekerja sama dengan Katadata Insight Center, melalui laporan *Status Literasi Digital Indonesia 2022* dengan jumlah responden yang cukup besar, yakni 10.000 orang. Dengan cakupan responden yang luas, grafik ini menjadi indikator penting untuk membaca kondisi literasi informasi masyarakat Indonesia secara umum.



Gambar 1. Tingkat Kepercayaan Diri Masyarakat Indonesia dalam Mengidentifikasi Berita hoaks (2022) (Annur, 2023).

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum memiliki keyakinan yang kuat dalam mengidentifikasi berita hoaks. Sebanyak 45% responden menyatakan berada pada posisi ragu-ragu atau “di antara yakin dan tidak yakin” dalam membedakan hoaks dan informasi yang benar. Selain itu, 20% responden mengaku tidak yakin, dan 3% menyatakan

sangat tidak yakin dengan kemampuan mereka. Di sisi lain, hanya 25% responden yang merasa yakin dan 7% yang sangat yakin mampu mengidentifikasi hoaks. Dengan demikian, hanya sekitar 32% responden yang benar-benar merasa percaya diri, sementara mayoritas masih berada dalam kondisi penuh keraguan.

Temuan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia belum memiliki pegangan yang kokoh ketika berhadapan dengan arus informasi digital. Ketidakpastian ini mencerminkan rendahnya kepercayaan diri publik dalam memahami dan memverifikasi informasi, terutama di tengah maraknya disinformasi dan misinformasi. Dalam situasi seperti ini, narasi palsu, klaim sejarah yang direkayasa, atau pernyataan otoritas fiktif dapat dengan mudah mengisi ruang kosong tersebut, sebagaimana terlihat dalam fenomena Sunda Empire. Ketika individu sendiri tidak yakin apakah suatu informasi benar atau salah, mereka cenderung lebih terbuka terhadap narasi yang disampaikan secara meyakinkan, emosional, atau simbolik.

Lebih jauh, kondisi ini berkaitan erat dengan dinamika era *post-truth*, di mana batas antara fakta dan kebohongan semakin kabur. Rendahnya kepercayaan diri dalam mengidentifikasi hoaks membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi simbolik dan emosional, bukan karena kurangnya akses informasi, tetapi karena lemahnya kemampuan menyaring dan menilai informasi secara kritis. Oleh karena itu, data ini memperkuat argumen bahwa persoalan utama bukan hanya pada penyebaran misinformasi itu sendiri, melainkan juga pada kesiapan masyarakat dalam menghadapinya. Dalam konteks demokrasi Indonesia, tantangan ini menjadi serius karena kualitas pengambilan keputusan publik sangat bergantung pada kemampuan warga untuk memahami informasi secara rasional dan bertanggung jawab.

Dampak terhadap demokrasi Indonesia

Kerentanan demokrasi Indonesia terhadap fenomena seperti Sunda Empire semakin terlihat jika dikaitkan dengan kondisi literasi informasi masyarakat. Data literasi digital Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 32% masyarakat yang benar-benar yakin mampu membedakan berita hoaks, sedangkan 45% berada pada posisi ragu-ragu dan 23% menyatakan tidak yakin sama sekali. Tingkat ketidakpastian ini menciptakan ruang psikologis yang subur bagi beroperasinya *Illusory Truth Effect*, di mana informasi yang berulang dan familiar cenderung diterima sebagai kebenaran meskipun tidak didukung bukti empiris.

Fenomena Sunda Empire dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teoretis yang relevan dalam studi demokrasi kontemporer. Salah satunya adalah konsep *deliberative democracy* yang menekankan pentingnya argumentasi berbasis fakta dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka ini, ruang demokrasi idealnya berfungsi sebagai arena dialog rasional, di mana warga negara menggunakan bukti dan penalaran logis

untuk menilai kebijakan dan klaim politik. Kehadiran Sunda Empire justru mengganggu pondasi tersebut karena penyebaran klaim pseudo-historis menyebabkan batas antara realitas empiris dan narasi fiktif menjadi kabur, sehingga melemahkan kualitas deliberasi publik.

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui perspektif misinformation *studies*, terutama dalam konteks penyebaran hoaks dan *pseudo-political beliefs*. Misinformasi bekerja bukan hanya melalui konten yang salah, tetapi juga melalui pola penyebaran dan mekanisme psikologis penerima informasi. Dalam kasus Sunda Empire, penyebaran narasi dilakukan melalui media digital yang memperkuat efek viral, sementara sebagian masyarakat menerimanya karena faktor seperti familiaritas, otoritas simbolik, dan repetisi informasi. Pola ini sejalan dengan model *illusory truth effect* dalam studi psikologi media, yang menjelaskan bahwa semakin sering sebuah klaim diulang, semakin besar kemungkinan klaim tersebut dianggap benar, meskipun tidak memiliki bukti empiris.

Dari perspektif *epistemic authority*, fenomena Sunda Empire menunjukkan munculnya otoritas alternatif di luar struktur negara dan institusi ilmiah. Dengan memanfaatkan simbol seperti seragam militer, gelar aristokratis, dan narasi sejarah global, kelompok ini membangun legitimasi semu yang bagi sebagian orang tampak kredibel. Kondisi ini memperlihatkan tantangan epistemik dalam demokrasi modern: legitimasi pengetahuan tidak lagi hanya berasal dari institusi formal seperti negara, akademisi, atau sistem pendidikan, tetapi juga dari aktor non-formal yang mampu mengemas narasi dengan gaya otoritatif.

Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi dilema: bagaimana menanggapi misinformasi tanpa melanggar prinsip kebebasan berpendapat yang menjadi pilar demokrasi. Penegakan hukum diperlukan, namun tidak dapat berdiri sendiri. Karena akar masalah ini terkait dengan kemampuan literasi publik, edukasi jangka panjang menjadi strategi penting agar masyarakat mampu menilai, memilah, dan menolak informasi manipulatif secara mandiri. Dengan demikian, respons terhadap fenomena seperti Sunda Empire bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan epistemik dan pendidikan demokratis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena Sunda Empire tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa sosial yang unik atau sekadar kasus penyimpangan informasi. Fenomena tersebut mencerminkan kerentanan masyarakat terhadap narasi pseudo-sejarah, misinformasi, dan penggunaan simbol-simbol kekuasaan di era *post-truth*. Kepercayaan publik terbentuk bukan terutama karena kekuatan fakta, melainkan melalui

pengulangan narasi, penggunaan simbol otoritas yang tampak meyakinkan, serta peran media sosial yang mempercepat penyebaran klaim dan memperluas jangkauan pengaruhnya.

Dari perspektif demokrasi, temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi informasi publik dapat mengganggu kualitas deliberasi demokratis. Ketika masyarakat kesulitan membedakan fakta dan hoaks, ruang publik menjadi rentan dikuasai narasi manipulatif yang tidak berbasis bukti. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan membuka peluang bagi aktor-aktor yang memanfaatkan misinformasi untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi informasi dan literasi politik sebagai strategi mendasar dalam menjaga ketahanan demokrasi.

Penguatan literasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pengetahuan faktual, tetapi juga sebagai upaya membangun kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam menilai informasi. Integrasi literasi media ke dalam sistem pendidikan formal, dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi, menjadi langkah jangka panjang yang penting untuk membekali masyarakat agar mampu mengenali propaganda, klaim simbolik palsu, dan narasi konspiratif. Di luar pendidikan formal, literasi media perlu diperluas melalui program komunitas, kampanye publik, dan pelatihan yang menyasar kelompok rentan terhadap misinformasi. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, masyarakat sipil, dan platform digital diperlukan untuk membangun ekosistem informasi yang sehat. Dengan masyarakat yang lebih kritis dan rasional dalam menyikapi arus informasi, demokrasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada prosedur politik, tetapi juga pada kualitas pengetahuan dan kesadaran publik.

DAFTAR REFERENSI

- Annur, C. M. (2023, May 30). Keyakinan Responden Terkait Kemampuannya dalam Mengidentifikasi Berita Hoaks (2022). Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/a6e3db4dd05d375/mayoritas-warga-indonesia-ragu-dalam-memilah-berita-hoaks>
- Bramasta, D. B., & Hardiyanto, S. (2020, January 15). Mengapa Keraton Agung Sejagat Muncul di Purworejo? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/15/181546465/mengapa-keraton-agung-sejagat-muncul-di-purworejo>
- Brashier, N. M. (2023). Do conspiracy theorists think too much or too little? *Current Opinion in Psychology*, 49, 101504. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101504>
- Brashier, N. M., & Marsh, E. J. (2020). Judging Truth. *Annual Review of Psychology*, 71(1), 499–515. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807>

- Christensen, G. (2024). Three concepts of power: Foucault, Bourdieu, and Habermas. *Power and Education*, 16(2), 182–195. <https://doi.org/10.1177/17577438231187129>
- Comito, C., Caroprese, L., & Zumpano, E. (2023). Multimodal fake news detection on social media: A survey of deep learning techniques. *Social Network Analysis and Mining*, 13(1), 101. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01104-w>
- Kılınçoğlu, D. T. (2024). The Reality of a National Mind. In D. T. Kılınçoğlu, *The National Mind* (pp. 21–44). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60135-4_2
- Kinnear, B., Schumacher, D. J., Varpio, L., Driessen, E. W., & Konopasky, A. (2024). Legitimation Without Argumentation: An Empirical Discourse Analysis of ‘Validity as an Argument’ in Assessment. *Perspectives on Medical Education*, 13(1). <https://doi.org/10.5334/pme.1404>
- Kompas.tv. (2020, January 17). Fakta Kegiatan Sunda Empire di Bandung. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/nasional/63146/fakta-kegiatan-sunda-empire-di-bandung>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Mendelberg, T. (2022). Status, Symbols, and Politics: A Theory of Symbolic Status Politics. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 8(6), 50–68. <https://doi.org/10.7758/RSF.2022.8.6.03>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 16094069231205789. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- O’Mahony, C., Brassil, M., Murphy, G., & Linehan, C. (2023). The efficacy of interventions in reducing belief in conspiracy theories: A systematic review. *PLOS ONE*, 18(4), e0280902. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280902>
- Palecek, M., & Hampel, V. (2024). Conspiracy Theories and Anxiety in Culture: Why is Threat-Related Misinformation an Evolved Product of Our Ability to Mobilize Sources in the Face of Un-represented Threat? *Philosophy of the Social Sciences*, 54(2), 99–132. <https://doi.org/10.1177/00483931231210335>
- Pillai, R. M., & Fazio, L. K. (2021). The effects of repeating false and misleading information on belief. *WIREs Cognitive Science*, 12(6), e1573. <https://doi.org/10.1002/wcs.1573>
- Redaksi. (2025, May 23). Menguak Narasi Sunda Empire: Antara Klaim Kekaisaran Dunia dan Sejarah Alternatif. <https://www.harianbanten.co.id/menguak-narasi-sunda-empire-antara-klaim-kekaisaran-dunia-dan-sejarah-alternatif/>
- Saputra, Y. (2020, Oktober). Sunda Empire: Tiga pimpinan “kekaisaran fiktif” di Bandung dijatuhi hukuman dua tahun penjara, terbukti “berbohong dan meresahkan masyarakat.” BBC News, Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54701012>

- Sauer, P. C., & Seuring, S. (2023). How to conduct systematic literature reviews in management research: A guide in 6 steps and 14 decisions. *Review of Managerial Science*, 17(5), 1899–1933. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00668-3>
- Udry, J., & Barber, S. J. (2024). The illusory truth effect: A review of how repetition increases belief in misinformation. *Current Opinion in Psychology*, 56, 101736. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101736>
- Vellani, V., Zheng, S., Ercelik, D., & Sharot, T. (2023). The illusory truth effect leads to the spread of misinformation. *Cognition*, 236, 105421. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2023.105421>